BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan dalam pengeloaan pemerintahan. Perangkat perundang-undangan tersebut menggambarkan adanya keputusan politik yang strategis dan penting karena menetapkan sistem desentralisasi dalam pengelolaan negara dan pemerintahan. Desentralisasi dilakukan dengan memberikan otonomi luas dan bertanggungjawab kepada daerah, yang bertumpu pada Kabupaten/Kota.

Rontoknya nilai-nilai otokratis orde baru telah melahirkan suatu visi yang baru mengenai kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera ialah pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, hak politik dan hak asasi masyarakat demokasi yang mengakui akan kebebasan individu yang bertanggung jawab pada masa orde baru hak-hak individu telah dirampas oleh pemerintah. Keadaan ini telah melahirkan suatu pemerintah yang terpusat dan otoriter sehingga tidak mengakui akan hak-hak daerah. Kekayaan nasional, kekayaan daerah telah dieksploitasi untuk kepentingan segelintir elite politik dan ekonomi di pusat. Keadaan yang terjadi berpuluh tahun tersebut telah melahirkan suatu rasa curiga dan sikap tidak percaya kepada pemerintah. Lahirlah gerakan-gerakan *separatisme*. Oleh sebab itu, *desentralisasi* atau otonomi daerah telah merupakan salah satu tuntutan era reformasi. Termasuk di dalam tuntutan otonomi daerah ialah *desentralisasi* pendidikan nasional (Tilaar, 2009:20).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Pergeseran paradigma di bidang pemerintahan dari *sentralisasi* ke *desentralisasi* tersebut mengakibatkan perubahan yang terjadi hampir pada semua aspek dalam urusan pemerintahan dan pelayanan publik, termasuk bidang pendidikan. Pendidikan di era otonomi daerah memiliki peran ganda, yaitu menjadi bagian dari kewenangan dan tanggungjawab yang dilimpahkan oleh pemerinta pusat kepada pemerintah daerah, sekaligus menjadi alat untuk mencapai tujuan yang sejalan dengan landasan filosofis otonomi daerah. Gaffar (2002:2) menyataka bahwa secara esensial, landasan filosofis otonomi daerah adalah pemberdayaan dan kemandirian daerah menuju kematangan dan kualitas masyarakat yang dicita-citakan.

Salah satu yang tak luput dari perubahan ini adalah pada bidang pendidikan. Hal ini menjadi kesempatan bagi setiap daerah untuk mengembangkan pendidikan kearah yang lebih baik sesuai dengan keinginan-keinginan setiap daerah melalui kebijakannya masing-masing. Sehingga kedepannya diharapkan pendidikan akan semakin berkualitas, ketika pengelolaan pendidikan itu diserahkan juga kepada daerah. Karena daerah lebih tahu apa yang menjadi permasalahan pada pendidikan dan bagaimana memecahkannya.

Lebih lanjut, kebijakan desentralisasi pemerintah dalam bidang pendidikan berdampak secara langsung terhadap pergeseran peran birokrasi pendidikan, yang selama ini dirasakan amat dominan dalam pengelolaa pendidikan persekolahan. Dalam konteks *desentralisasi* pengelolaan pendidikan peran tersebut harus

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

diimbangi oleh tingginya keterlibatan serta partisipasi masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Pendidikan merupakan akar dari pembangunan kualitas sumber daya manusia. Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas perlu mempunyai layanan pendidikan yang baik. Peran pemerintah sangat penting dalam menciptakan layanan pendidikan yang baik guna menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas baik. Kemudian, sekolah sebagai lembaga pendidikan formal bertugas untuk menerapkan sebuah layanan pendidikan yang bermutu. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 ayat (1), disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Layanan pendidikan yang berorientasi pada kepuasan peserta didik.

Pendidikan pada hakikatnya adalah proses pematangan kualitas hidup melalui proses tersebut diharapkan manusia dapat memahami apa arti dan hakikat hidup, serta untuk apa dan bagaimana menjalankan tgas hidup dan kehidupan secara benar. Karena itulah fokus pendidikan di arahkan pada pembentukan kepribadian unggul dengan menitikberatkan pada proses pematangan kualitas logika, hati, akhlak, dan keimanan. Puncak pendidikan adalah tercapainya titik kesempurnaan kualitas hidup.

Sebagai suatu proses, pendidikan dimaknai sebagai semua tindakan yang mempunyai efek pada perubahan watak, Kepribadian, pemikiran, dan perilaku. Dengan demikian pendidikan bukan sekedar pengajaran dalam arti kegiatan mentranfer ilmu, teori, dan fakta-fakta akademik semata; atau bukan sekedar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

urusan ujian, penetapan kriteria kelulusan, serta pencetakan ijazah semata. Pendidikan pada hakikatnya merupakan proses pembebasan peserta didik dari ketidak tahuan, ketidak mampuan, ketidak berdayaan, ketidak benaran, ketidak jujuran dan dari buruknya hati, akhlak dan keimanan.

Oleh karena itu, pendidikan tidak boleh menjadikan manusia asing terhadap dirinya dan asing terhadap hati nuraninya, pendidikan tidak boleh melahirkan sikap, pemikiran, dan perilaku semu. Pendidikan tidak boleh menjadikan manusia berada di luar hatinya. Pendidikan harus menyatukan sikap, pemikiran, perilaku, hati nuraninya, dan keimanan menjadi satu kesatuan yang utuh. (Mulyasana, 2012:2).

Untuk itu, proses pendidikan tidak hanya menekankan pada hafalan dan latihan penguasaan soal-soal ujian. Proses pembelajaran yang demikian telah banyak menelan korban, di mana para lulusan hanya membawa selembar ijazah, dibalik ijazah yang dimilikinnya. Tidak tercemin adanya efek pada perubahan watak/kepribadian, pemikiran, dan perilakunya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Proses pembelajaran, selain diarahkan pada pembentukan semangat, motivasi, kreativitas, keuletan, dan kepercayaan diri, juga ditekankan pada pembentukan kesadaran, disiplin, tanggung jawab, dan budaya belajar yang baik. Proses pembelajaran yang demikian dikembangkan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, kebutuhan, karakteristik dan gaya belajar peserta didik. Itulah pendidikan bermutu dan berdaya tahan.

Pendidikan bermutu selain dikembangkan melalui transformasi nilai-nilai positif, juga diselenggarakan sebagai alat untuk memberdayakan semua potensi

peserta didik menuju tingkat kesempurnaan. Sehingga perlu diadakan sebuah perubahan-perubahan yang dapat membuat pendidikan di negara ini menjadi lebih baik.

Tekanan kuat untuk perubahan-perubahan di bidang pendidikan sedang tumbuh. Perubahan-perubahan ini tidak dapat dipandang sebagai terpisah-pisah atau dalam isolasi tapi perhubungan satu sama lain dan pengaruhnya adalah kumulatif.

Perluasan sistem pendidikan menciptakan tekanan untuk mengubah sifat dan orientasi pendidikan; perubahan ekonomi dan sosial memerlukan penyesuaian baru dalam sistem pendidikan. Ini dapat meliputi perumusan kembali maksud, tujuan, dan fungsi pendidikan dalam hubungan dengan kebutuhan-kebutuhan baru maupun dampak psikologisnya, terutama terhadap generasi muda. Semua ini menyarankan bahwa suatu proses perubahan yang menyeluruh mengenai struktur, isi, dan metode pendidikan akan harus di usahakan melalui suatu pendekatan inovatif yang menyeluruh dalam administrasi pendidikan yang lebih baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Administrasi yang efektif memainkan peranan yang sangat menentukan dalam stuktur dan artikulasi sistem pendidikan melalui seluruh prosesnya yang melingkar perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Para ahli pendidikan pada umumnya sependapat bahwa mutu jasa administrasi pada suatu sekolah adalah faktor yang paling berarti yang menentukan tingkat efektifitas program pendidikan. Ini disebabkan karena administrasi menerobos setiap aspek hidup sekolah. Tindakan admnistratif mempunyai potensi untuk menunjang, memajukan, dan mengembangkan atau bahka untuk menghilangkan dan

mengacaukan setiap atau semua bagian dari organisasi sekolah secara umum, tujuan administrasi ialah untuk menjamin bahwa sistem pendidikan berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu sesuai dengan tujuan dan rencana tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. (Yani, 2012:13).

Administrasi pendidikan di dalam era otonomi daerah ujung tombaknya adalah setiap kabupaten dan kota di Indonesia. Salah satu kota tersebut adalah Kota Bandung. Kota Bandung Sebagai salah satu kota dengan sebutan kota Pendidikan telah mengeluarkan kebijakan mengenai administrasi pendidikan. Salah satunya adalah dengan dengan administrasi pendaftaran siswa-siswa baru pada sekolah sekolah di Bandung. Kebijakan ini dikenal dengan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bagi Sekolah Negeri.

Salah satu layanan pendidikan adalah layanan penerimaan peserta didik. Layanan penerimaan peserta didik sebagai permulaan dalam pelayanan di suatu lembaga pendidikan sebagai layanan di luar bidang akademik. Penerimaan peserta didik baru merupakan program rutin setiap tahun semua sekolah. Setiap tahun ajaran baru semua sekolah membuka pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Penerimaan peserta didik termasuk suatu kegiatan penting dalam manajemen peserta didik. Kegiatan ini akan menentukan calon peserta didik yang berhak diterima oleh sekolah. Dalam kegiatan ini sekolah juga bisa menentukan kualitas peserta didik yang diterima. Panitia PPDB akan melakukan berbagai cara untuk mempromosikan sekolah agar banyak diminati oleh calon peserta didik baru.

Sejak Ridwan Kamil menjadi walikota kebijakan ini adalah salah satu terobosan di dalam pendidikan. Karena dengan kebijakan PPDB ini, maka setiap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

pendaftaran siswa baru akan terintegrasi dengan teknologi yaitu melalui internet. Sehingga akan memudahkan bagi setiap pendaftar. Dengan kebijakan ini diharapkan akan membantu sekolah-sekolah negeri yang saat ini banyak sekali. Seperti tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1.
Jumlah Sekolah Negeri di Kota Bandung

No	Tingkat Sekolah	Jumlah
1.	Sekolah Dasar	820
2.	Sekolah Menengah Pertama	54
3.	Sekolah Menengah Atas	27
4.	Sekolah Menengah Kejuruan	17
T o t a l		**918**

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung

Salah satu yang terdapat di dalam isi kebijakan tersebut, bahwa setiap siswa yang akan mendaftar diprioritaskan untuk mendaftar di wilayah kecamatannya. Sehingga kemungkinan untuk masuk ke sekolah favorit di wilayah yang lain akan sulit karena akan ada pengurangan nilai. Sehingga di sisi lain sekolah kemungkinan besar hanya akan mendapatkan kebanyakan siswa dari kecamatannya dan yang terdekat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Salah satu sekolah yang menerapkan kebijakan ini adalah Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 26 Kota Bandung. Sehingga di SMAN 26 Kota Bandung ini, kebanyakan siswanya berasal dari daerah sekitar Kecamtan Cibiru, Ujung Berung dan sekitarnya. Namun apakah kebijakan ini akan membuat pelayanan pendidikan efektif?

Tabel 1.2
Daya Tampung PPDB SMAN 26 Kota Bandung Tahun Akademik 2016/2017

Kondisi	Jalur Non Akademis		Jalur Akademis		
	Afirmasi (SKTM, MoU, UU)	Prestasi DK &LK	Luar Kota / Kategori B	Dalam Wilayah	Luar Wilayah
%	26,50%	5%	10%	37,50%	21,00%
Jumlah	76,06	14,35	28,7	107,63	60,27
Pembulatan	76	14	29	108	60

Sumber: SMAN 26 Kota Bandung

Keterangan :

1. Jumlah total daya tampung: 288 siswa
2. Siswa tidak naik kelas : 1 siswa.

Daya tampung tersebut didasarkan atas perimbangan tenaga pendidik dan sarana pendukung yang ada di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 26 Kota Bandung :

1. Jumlah Guru : 48 orang
   a. Guru Peminatan/Jurusan : IPA = 9 orang
   b. Guru Peminatan/Jurusan : IPS = 7 orang
   c. Guru Peminatan/Jurusan : -
2. Kesiapan Ruang :
   a. Jumlah Laboratorium : 3 ruang
   b. Jumlah Ruang Kelas X : 8 ruang

      R1 Luas: 72 m^2 R5 Luas: 72 m^2

      R2 Luas: 72 m^2 R6 Luas: 72 m^2

      R3 Luas: 72 m^2 R7 Luas: 72 m^2

      R4 Luas: 72 m^2 R8 Luas: 72 m^2

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 26 Kota Bandung merupakan sekolah yang memiliki pretasi-prestasi yang begitu unggul tidak kalah dengan sekolah menengah atas negeri favorit lainya yang ada di kota Bandung, di mana SMAN 26 Kota Bandung merupakan sekolah percontohan dan sekolah yang unggul di kota Bandung yang menggunakan kurikulum KTSP (kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)).

Selain di bidang akademik SMAN 26 Kota Bandung memiliki keunggulan di bidang olahraga, SMAN 26 kota Bandung sudah sering memenangkan kejuaran olahraga *Hockey* antar SMA Se-Jabar, DKI & Banten dan keunggulan lain SMAN 26 Kota Bandung memiliki program magang saat liburan bagi para siswa kelas X dan XI yang mana program tersebut dilaksanakan untuk melatih para siswa agar mandiri dan dapat terjun langsung di lapangan pekerjaan agar mereka bisa terlatih dan ketika lulus sekolahpun mereka yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ketinggkat perkuliahan, mereka bisa langsung kerja karena mereka telah dilatih melalui program magang tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Berdasarkan pemapara latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan mengambil judul **“PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PPDB 2016 TERHADAP EFEKTIVITAS PELAYANAN SISWA BARU DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) 26 KOTA BANDUNG"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi, diantaranya:

a. Kebijakan PPDB telah dijalankan sejak kepemimpinan Bapak Ridwan Kamil Di kota Bandung. Hal ini menjadi sebuah terobosan baru bagi dunia pendidikan di Kota Bandung bahkan di Indonesia dalam hal proses pendaftaran. Namun bagaimana implementasinya apakah baik atau tidak. Ini yang menjadi permasalahan. Salah satunya adalah yang ada di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 26 Kota Bandung.
b. Pelayanan pendidikan, terutama pada saat pendaftaran sekolah di Kota Bandung sebelum adanya kebijakan ini masih manual dan tidak terintegrasi. Namun dengan adanya kebijakan baru ini maka pelayanan akan berubah. Lalu apakah berubahan yang ada di dalam ketika kebijakan ini digulirkan.
c. Adanya kebijakan baru akan merubah sebuah tatanan pelayanan yang ada. Termasuk pada kebijakan PPDB ini. Salah satunya juga terjadi di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 26 Kota Bandung. Apakah dengan kebijakan baru ini pelayanan menjadi efektif atau tidak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

C. Rumusan Masalah

Berdasarakan identifikasi masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana realitas implementasi kebijakan PPDB di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 26 Kota Bandung?

b. Bagaimana realitas efektifitas pelayanan pendidik bagi siswa baru di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 26 Kota Bandung?
c. Seberapa besar pengaruh kebijakan PPDB terhadap efektivitas pelayanan pendidikan bagi siswa baru di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 26 Kota Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui realitas implementasi kebijakan PPDB di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 26 Kota Bandung.
b. Untuk mengetahui realitas efektifitas pelayanan pendidik bagi siswa baru di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 26 Kota Bandung.
c. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kebijakan PPDB terhadap efektivitas pelayanan pendidikan bagi siswa baru di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 26 Kota Bandung.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

E. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini, penulis berharap dapat berguna bagi setiap orang. Adapun kegunaan penelitian ini, diantaranya:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan, khususnya pada ilmu Administrasi Publik. Terutama

terfokus pada pengaruh kebijakan PPDB terhadap efektivitas pelayanan pendidikan bagi siswa baru di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 26 Kota Bandung. Sehingga dengan penelitian ini, dapat melihat gambaran mengenai implementasi tentang kebijakan tersebut.

b. Kegunaan Praktis

a) Bagi Penulis

Diharapkan penulis mendapatkan tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat penulis secara teoritis selama di bangku perkuliahan jutusan Administrasi Publik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Dan diharapkan menjadi bekal untuk mengaplikasikan pada kehidupan sehari-hari.

b) Bagi Pemerintah Kota Bandung

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, pemerintah Kota Bandung, terutama Dinas Perhubungan Kota Bandung dapat melihat pelaksanaan kebijakan yang telah dikeluarkan berdampak baik atau tidak bagi warganya. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk mengevaluasi kebijakan PPDB di Kota Bandung.

c) Bagi Masyarakat

Semoga dengan adanya penelitian ini, diharapkan masyarakat lebih memahami kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru. Terutama bagi orang tua yang hendak mendaftarkan anaknya ke sekolah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

F. Kerangka Pemikiran

Otonomi daerah membawa perubahan kedalam segala hal. Salah satunya adalah pada pendidikan. Sehingga pendidikan mayoritas diserahkan kepada daerah. Oleh karena itu daerah dituntut untuk membuat kebijakan yang terbaik untuk mendukung proses pembelajaran.

Kebijakan itu harus dibuat secara sesuai kebutuha yang ada di masyarakat. Setelah suatu kebijakan dibuat, maka selanjutnya pemerintah adalah harus melaksanakan kebijakan tersebut. Pelaksanaan kebijakan atau implementasi kebijakan ini penting sebagai sebuah alat untuk "mengeksekusi" program. Adapun pengertian implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier adalah:

> "Memahami apa yang seyogyanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasiakannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian."

Implementasi kebijakan publik, sejatinya tidak akan berhasil tanpa adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya atau disebut sebagi sebuah indikator keberhasilan. Pada penelitian ini, peneliti merujuk teori yang dikeluarkan oleh Edward. Didalam teorinya dikatakan bahwa Berhasil tidaknya pelaksanaan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Menurut Edward III dalam Agustino (2006:49) ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik diantaranya adalah :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

1. Faktor komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunkator kepada komunikan. Komunikasi kebijkan merupakan proses penyampaian informasi kebijkan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijkan. Informasi kebijkan public perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku dapat mengetahui dan memahami isi, tujuan, arah, kelompok sasaran sehingga para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan agar tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan apa yang direncanakan. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi. Pertama, dimensi transmisi (*transmissions*) yaitu kebijakan publik tidak hanya disampaikan pada para pelaksana kebijakan saja tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran dari kebijakan. Kedua, kejelasan yaitu adanya kejelasan dari isi kebijakan itu sendiri baik target, sasaran maupun maksud. Ketiga, konsistensi yaitu adanya keberlangsungan kebijakan yang dilakukan secara terus menerus.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

2. Sumber daya

Sumber daya menurut Edward III meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya peralatan dan sumber daya informasi dan kewenangan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan.

a. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan harus cukup jumlahnya, mempunyai keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran dan perintah dari atasan. Oleh karena itu sumber daya

manusia harus ada kelayakan dan ketepatan antara staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang ditangani.

b. Sumber daya keuangan

Dalam pelaksanaan kebijakan tersedianya sumber daya keuangan harus diperhatikan karena jika terbatasnya sumber daya keuangan maka akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan selain itu program tidak dapat dilaksanakan dengan optimal, terbatasnya sumber daya keungan mengakibatkan disposisi para pelaku rendah, bahkan *goal displacement*.

c. Sumber daya peralatan

Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk oprasionalisasi implementasi suatu kebijkan yang meliputi gedung, tanah dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dari pelaksanaan tujuan.

d. Sumber daya informasi dan kewenangan

Sumber daya informasi menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup tentang berkaitan bagaimana cara mengimplementasikan kebijakan. Selain itu informasi tentang kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Kewenangan juga merupakan sumber daya lain yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Kewenangan sangat diperlukan, terutama untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sesuai dengan mereka yang kehendaki.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

3. Disposisi

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan salah satunya ditentukan oleh disposisi, yaitu kemauan, kecenderungan dari para pelaku kebijakan untuk melaksanakan suatu kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

4. Struktur birokrasi

Struktur organisasi mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi. Pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi bersangkutan dan hubungan organisasi dengan organiasi luar dan sebagainya. Oleh karena itu, struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi dan standar prosedur operasi yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaku kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya.

Pemerintah dalam membuat kebijakan publik harus berdasarkan pada kepentingan publik. Salah satunya adalah membuat efektif sebuah pelayanan publik yang nyaman bagi masyarakat. Sarwito (1987) menyatakan "efektifitas sebagai suatu yang behasil guna yaitu pelayanan bercorak maupun mutu dan kegunaanya benar-benar sesuai dengan kebutuhan". Sementara itu Gronroos mendefinisikan pelayanan adalah suatu aktifitas atau serangkaian aktifitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan. (Ratminto, 2005:2).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Menurut Siagian, efektifitas sebagai orientasi kerja menyoroti empat hal:

1. Sumber daya, dana, sarana dan prasarana yang dapat digunakan oleh organisasi/perusahaan yang jumlahnya sudah ditentukan dan dibatasi.
2. Jumlah dan mutu pelayanan jasa yang diberikan sudah ditentukan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Batas waktu dalam penyelesaian pekerjaan sesuai dengan apa yang telah di tentukan sebelumnya.
3. Tata cara yng ditempuh untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang telah ditentukan sebelumnya. (Siagian, 2003:17).

Paul D Epstein mengemukakan, untuk mengukur tercapainya efektivitas pelayanan itu dilihat dai dua aspek:

1) Kualitas

Penyelesaian pekerjaan yang ditangani sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan instansi sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan memberikan kepuasan terhadap masyarakat yang dilayani.

2) Kuantitas

Kemampuan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target atau jumlah pencapaian yang sudah ditetapkan dan diharapkan. (Paul D Epstein, 2004:4).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

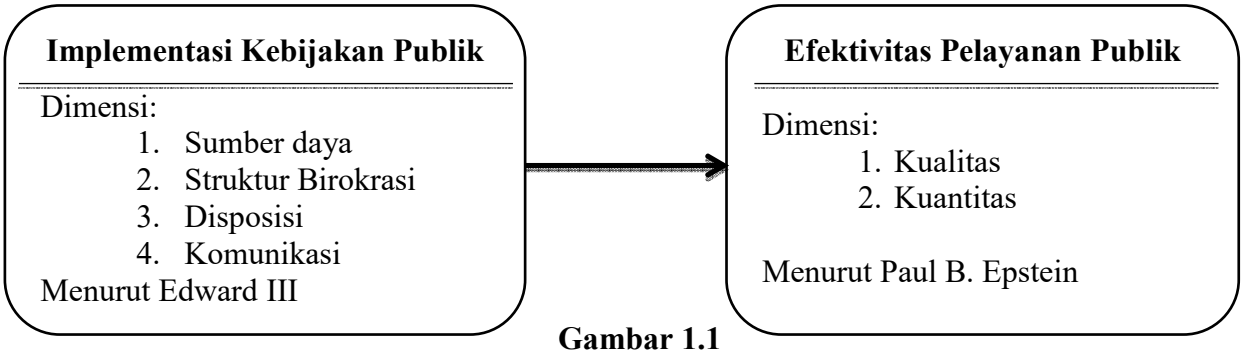

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran penelitian

G. Hipotesis

Menurut Nasution (2011) "hipotesis adalah pernyataan tentatif yang merupakaan dugaan atau terkaan tentang apa saja yang kita amati dalam usaha untuk memahaminya".

a. Hipotesis alternatif atau hipotesis kerja (Hα)

Hα: $\rho > 0$ dan x dan y: Terdapat pengaruh implementasi kebijakan PPDB terhadap efektivitas pelayanan pendidikan bagi siswa baru di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 26 Kota Bandung.

b. Hipotesis nol (H_0)

$H_0 = \rho \leq 0$, x dan y : Tidak terdapat pengaruh implementasi kebijakan PPDB terhadap efektivitas pelayanan pendidikan bagi siswa baru di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 26 Kota Bandung.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG